

DARI ONDERAFDEELING HINGGA TERBENTUKNYA KABUPATEN JENEPONTO (1909-1959)

Ismail Syawal

Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Tadulako

maield.thoratea@gmail.com

Abstract

This study focuses on Jeneponto as a Regency in South Sulawesi Province. In the historiography of South Sulawesi, Jeneponto has not been written much, including its changes since becoming Onderafdeeling until its formation as a Regency. This change prompted the writer to examine the occurrence of these changes, especially the transition from Onderafdeeling to the current Jeneponto Regency. This study uses the historical method through four stages, namely Heuristics, Criticism, Interpretation, and Historiography. The results of this study found three things, namely: (1) the Turatea Kingdom appeared as one of the Makassar kingdoms in Jeneponto which formed a unity called the Turatea Confederation (Toeratea-landen). This confederation was formed from three karaeng-an regions, namely Binamu, Bangkala, and Laikang; (2) When Turatea was annexed by the Dutch East Indies, in 1909 the Dutch East Indies government carried out a regional arrangement. One form of arrangement is the establishment of Onderafdeeling Jeneponto; and (3) Jeneponto was formed as a Level II Region/Regency in 1959 based on Law number 29 of 1959. The issuance of the Law was based on regional conditions, both in terms of population and security. The growth and development of Jeneponto Regency is inseparable from its history, economy, politics, and socio-culture.

Keywords: *Onderafdeeling, Regency, Jeneponto*

Abstrak

Kajian ini difokuskan pada Jeneponto sebagai Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam historiografi Sulawesi Selatan, Jeneponto belum banyak ditulis termasuk perubahan-perubahannya sejak menjadi *Onderafdeeling* hingga terbentuknya sebagai Kabupaten. Perubahan inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji terjadinya perubahan tersebut, utamanya peralihan dari *Onderafdeeling* menjadi Kabupaten Jeneponto saat ini. Penelitian ini menggunakan metode sejarah melalui empat tahapan, yaitu *Heuristik*, *Kritik*, *Interpretasi*, dan *Historiografi*. Hasil penelitian ini ditemukan tiga hal, yakni: (1) Kerajaan Turatea tampil sebagai salah satu Kerajaan Makassar di Jeneponto yang membentuk sebuah kesatuan yang disebut Konfederasi Turatea (*Toeratea-landen*). Konfederasi ini terbentuk dari tiga wilayah ke-*karaeng-an*, yakni Binamu, Bangkala, dan Laikang; (2) Ketika Turatea dianeksasi Hindia Belanda, pada tahun 1909 pemerintah Hindia Belanda melakukan penataan wilayah. Salah satu bentuk penataan itu adalah pembentukan *Onderafdeeling* Jeneponto; dan (3) Jeneponto terbentuk sebagai Daerah Tingkat II/Kabupaten tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang nomor 29 tahun 1959. Terbitnya Undang-Undang tersebut didasarkan pada kondisi daerah, baik dari segi penduduknya maupun keamanannya. Tumbuh dan berkembangnya Kabupaten Jeneponto tidak terlepas dari sejarah, ekonomi, politik, dan sosial-budayanya.

Kata Kunci: *Onderafdeeling, Kabupaten, Jeneponto*

Pendahuluan

Sejarah Sulawesi Selatan belum banyak membicarakan Jenepono di bagian Selatan Propinsi Sulawesi Selatan, padahal Jenepono memiliki sumber-sumber sejarah yang memadai dan memiliki perkembangan yang turut mempengaruhi kawasan ini dari masa ke masa. Sumber data tertua atau literatur yang menyebutkan keberadaan Jenepono dilansir dalam Peta orang Eropa tahun 1693. Nama Jenepono disebut “Jennepoento”, merupakan bagian dari wilayah Toerate dengan beberapa kampung lainnya, seperti *Tino*, *Roenbia* (baca: Rumbia), *Pangie* (baca: Panging), *Tolo*, *Sapanang*, *Parapa* (baca: Parappa), *Binamo* (baca: Binamu), *Tamanrojad* (baca: Tamanroya), *Boeloe Boeloe* (baca: Bulobulo), *Jennepoento* (baca: Jenepono), *Tana Toa* (baca: Tanatowa), *Bankala* (baca: Bangkala), *Pantanglassang* (baca: Pattallassang), *Pangkajene*.¹

Pada tahun 1752 Aubert melakukan pemetaan wilayah pulau Sulawesi. Dalam peta tersebut, Aubert menyebut kampung “Toeratea” dan beberapa pemukiman kecil, seperti *Padjalawe*, *Rongkeke*, *Togotogo*, *Petany*, *Tino* dan *Telo* di mana terdapat sungai yang disebut sungai *Tino* di arah hulu terdapat kampung *Rumbi* (sungai *Tino* sekarang disebut sungai *Kelara*).² Secara geografis, kampung dan pemukiman kecil ini terdapat dua sungai, yakni sungai *Binamu* di sebelah barat dan sungai *Turatea* di sebelah baratnya lagi. Kampung besar di sungai *Binamu* berada di arah hulu sungai, sedangkan kampung besar lainnya berada di sungai *Turatea* di arah hilir (muara) sungai. Wilayah ini di dalam peta diidentifikasi sebagai *Turatea* (Toeratea). Di sebelah sungai *Tino* terletak wilayah *Boeloecoemba* (Bulukumba) di muara sungai terdapat benteng VOC di kampung *Bonthain* (Bantaeng), dan sebelah timurnya terdapat benteng VOC di kampung *Boeloecomba* (Bulukumba).

Selanjutnya, tahun 1858 salah seorang Kapitein Belanda bernama F.G. Steck membuat peta Sulawesi dan menyebutkan wilayah “Toeratea” dengan beberapa pemukiman kecil, yakni *Alone* (baca: Allu), *Totjoe*, *Seloe*, *Nimoli*, *Munko*, *Manisse*, *Djato* (baca: Jenepono), *Baring baringang*, *Nepo*, *Mani*, *Tabitomontjong*, *Tabilomboe*, *Toeti*, *Tare* (baca: Taring), *Borlie* (baca: Boronglowe), *Boenkall* (baca: Bangkala), *Tanaloa* (baca: Tanatoa), *Nasara*, *Nassoe*, *Tonibole*, *Batoelo*, *Barobo* (baca: Barobbo), *Boeloesoekang* (baca: Bulussukang), *Bola*, *Baroe*, *Jonggoa Kaselombang*, *Tounde*, *Loensiedie Tino* *Padjinongan* (baca *Tino Paccinongan*), *Binamo* (baca: Binamu), *Lambot*, *Bonu*, *Seropa* (baca: Parappa), *Belokalong* (baca: Belokallong), *Boeloboloe* (baca: Bulobulo), dan lain-

¹ Map., “Sout Zee van Celebes,” 1693.

² Jean Michiel Aubert, “Kart van Een Deel van de Zuidkust van Celebes,” 1752.

lain.³ Kampung-kampung tersebut digambarkan sebelum Turatea atau Jenepono mendapat pengaruh dari Belanda. Ketiga sumber inilah yang tertua untuk Jenepono muncul dalam sebuah peta resmi.

Ian Caldwell & Wayne A Bougas dalam bukunya yang berjudul: “*Sejarah Awal Binamu dan Bangkala di Sulawesi Selatan*” menyebut “Jenepono” sebagai daerah taklukan dari Kerajaan Binamu yang ketiga. Wilayah ini terletak di dekat muara sungai Jenepono. Ketiga daerah taklukan dan wilayah kekuasaan Kerajaan Binamu yaitu Sidenre, Balang, dan Jenepono.⁴ Hal yang hampir sama ditemukan oleh Muklis Hadrawi dalam kajiannya yang berjudul “*Bangkala dan Binamu: Suatu Kajian Naskah Lontara’ Dalam Sosial-Politik Jenepono Kuno*”, menyatakan Jenepono sebenarnya sebuah nama yang dimunculkan pada abad XIX ketika Sulawesi Selatan berada pada era pemerintahan kolonial. Nama Jenepono sebenarnya telah dikenal pada abad ke-17 yakni merujuk pada sebuah toponimi berstatus *wanua palili* (negeri bagian) dari kerajaan Binamu. Di dalam daftar *palili* Binamu toponimi itu sekarang disebut dengan nama Jenepono Toa. Nama Jenepono pun telah tercatat di dalam *lontara’* sebagai dokumen pribumi masyarakat setempat selain hadir dalam tradisi lisan masyarakat. Pada abad XIX konteks toponimi Jenepono merujuk pada area yang lebih meluas serta merepresentasikan wilayah Bangkala dan Binamu. Secara geografi wilayah kekuasaan Bangkala dan Binamu memang melingkupi wilayah Kabupaten Jenepono sekarang ini, yakni Bangkala melingkupi wilayah timur dan Binamu melingkupi wilayah Barat Jenepono.⁵

Berdasarkan beberapa diktum di atas, Jenepono sebagai suatu lokus sejarah memiliki pengalaman sendiri dalam prosesi kesejarahannya. Di daerah ini pernah berdiri kerajaan yang bercorak Makassar dan memiliki wilayah tersendiri. Selain itu, daerah ini juga memiliki sejarah yang menarik sejak masa kolonial hingga terbentuknya kabupaten otonom di wilayah Sulawesi Selatan sekarang ini. Pertanyaannya adalah kapan terjadi perubahan dan bagaimana prosesnya hingga Jenepono terbentuk sebagai Kabupaten?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti prosedur kerja dalam penelitian sejarah yang disajikan oleh Gottschalk, yakni mengumpulkan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber, pengujian otentisitas sumber-sumber yang didapatkan

³ F. G. Steck, “Kaart van Celebes En Onderhorigheden,” 1858.

⁴ Ian Caldwell & Wayne A Bougas, *Sejarah Awal Binamu dan Bangkala di Sulawesi Selatan*, Yogyakarta: Ombak., 2016.

⁵ Muklis Hadrawi, “Bangkala dan Binamu: Suatu Kajian Naskah *Lontara’* dalam Sosial-Politik Jenepono Kuno,” *ETNOSLA: Jurnal Etnografi Indonesia*, Volume 2 Edisi 2, Desember 2017., 2017.

(kritik eksternal) dan penentuan kredibilitas sumber-sumber yang ditemukan (kritik internal).⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan konsep ilmu-ilmu sosial. Kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber yang terkait dengan judul penulis, dilakukan di berbagai tempat seperti; Perpustakaan dan ANRI Makassar. Hasil penelusuran ini, penulis menemukan berbagai sumber yang meliputi buku, artikel, jurnal dan arsip.

Sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan ini, diantaranya karya Ian Caldwell & Wayne A Bougas tahun 2016 berjudul: *Sejarah Awal Binamu dan Bangkala di Sulawesi Selatan*, dan Muhlis Hadrawi berjudul: *Bangkala dan Binamu: Suatu Kajian Naskah Lontara' dalam Sosial-Politik Jeneponto Kuno* terbit tahun 2017. Sumber tersebut dijadikan kerangka yang menyeluruh. Akan tetapi rinciannya dilengkapi dengan laporan-laporan politik (Pemerintah Kolonia) Hindia Belanda. Selain itu, secara metodologi, sumber buku maupun jurnal itu harus dicocokkan dengan sumber-sumber arsip, karena sebagian berdasar dari tradisi lisan. Artikel sezaman yang diterbitkan oleh majalah masa kolonial Belanda, termasuk peta juga digunakan sebagai sumber.

Setelah semua sumber terkumpul, dilakukan kritik sumber, yakni menyaring atau menyeleksi setiap sumber sejarah yang berkaitan dengan Jeneponto. Kritik sumber ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu; kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan untuk menguji otentitas (keaslian) sumber yang meliputi waktu penulisan, penulisnya, dan lain sebagainya. Selain itu, kritik intern untuk memperoleh sumber yang memiliki tingkat validitas (keakuratan) tinggi, khususnya isi sumber. Melalui kritik ini, penulis menetapkan sumber yang dianggap kredibel terkait pokok bahasan tentang Jeneponto. Tahap selanjutnya adalah interpretasi (penafsiran) untuk menyimpulkan sejumlah sumber mengenai bahan-bahan yang otentik. Pada tahapan ini, penulis mencoba menghubungkan beberapa sumber informasi terkait Jeneponto. Kemudian terakhir adalah historiografi, yakni penyajian hasil penelitian sesuai dengan ketentuan penelitian sejarah dan penulisan yang berlaku, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian, mulai dari perencanaan hingga penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

- 1. Gambaran Umum Jeneponto: Sebuah Kenyataan Historis**
 - a. Kondisi Geografis**

⁶ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia., 1986.

Daerah Jeneponto merupakan salah satu daerah dalam wilayah administratif Propinsi Sulawesi yang terletak di ujung selatan bagian barat ketimur sepanjang garis pantai laut flores dengan garis koordinat 5.23'12"-5.42'1,2 Lintang Selatan dan 119.29'12"-119.56'44,9" Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Jeneponto mencakup 113 desa/kelurahan yang terdiri dari 82 desa dan 31 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto adalah 74.979 Ha atau 749,79 Km² dan hanya 1.20% dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi 11 Kecamatan. Kesebelas kecamatan tersebut, terdiri dari: Bangkala dengan luas 121,82 km², Bangkala Barat 152,96 km², Tamalatea 57,58 km², Bontoramba 88,30 km², Binamu 69,49 km², Turatea 53,76 km², Batang 33,04 km², Arungkeke 29,91 km², Tarowang 40,68 km², Kelara 43,95 km², dan Rumbia dengan luas 58,30 km². Kesebelas Kecamatan tersebut, Bangkala Barat merupakan wilayah yang terluas, kemudian menyusul kecamatan Bangkala induk, Bontoramba, Binamu, Rumbia, Tamalatea, Turatea, Kelara, Tarowang, Batang, dan yang terakhir Arungkeke.⁷

Jeneponto memiliki batas wilayah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Gowa, sebelah Timur dengan Bantaeng, sebelah Selatan dengan Selat Flores, dan sebelah Barat dengan Takalar. Berdasarkan letaknya, Jeneponto terbagi menjadi 3 bagian, pertama, wilayah pesisir pantai dengan luas 170 km² yang terdiri dari: Garassikang, Pallengu, Mallasoro, Ci'nong, Tonrokassi, Kalumpang, Ujung Loe, Jeneponto, Bulu-bulu, Palajau, Togo-togo, Arungkeke, Pao dan Tarowang, Tino. Kedua, wilayah pegunungan dengan luas 323 km², yakni Rumbia. Ketiga, wilayah dataran dengan luas 200 km², terdiri dari: Pattopakang, Panyalangkang, Bangkala, Kalimporo, Tanatoa, Ruku-ruku, Nasraq, Balang, Sidenre, Pattalasang, Sapanang, Karang Loe, Jombe, Tolo, Bontorappo.

b. Perkembangan Penduduk

Sebenarnya data penduduk memberi banyak kesaksian yang sangat berarti dalam penelitian setiap wilayah dan masyarakatnya. Misalnya sensus **tahun 1930**, Jeneponto telah memiliki penduduk sebanyak **147.652 jiwa**.⁸ Kemudian pada sensus penduduk **tahun 1961**, Jeneponto terbagi menjadi enam Kecamatan, antara lain: Arungkeke, Binamu I, Binamu II, Binamu III Tamalatega, Tarontang, dan Bangkala. Keenam kecamatan tersebut, memiliki jumlah penduduk sebanyak **183.443 jiwa** (laki-laki sebanyak 89.611 jiwa, dan perempuan sebanyak 93.832 jiwa). Hal ini dapat dirinci berdasarkan Kecamatan mencakup beberapa desa, antara lain: **Arungkeke** terdiri dari 5 Desa, yakni: Tamanraya,

⁷ BPS, "Kabupaten Jeneponto dalam Angka," 2022.

⁸ *Volkstelling 1930. Inheemsche Bevolking Van Borneo, Celebes, De Kleine Soenda Eilanden En De Molukken, Deel V, Departement Van Economische Zaken. Batavia: Landsdrukkerij, 1936., n.d.*

Petang/Tunrunggawang, Arungkeke, Bungeng, dan Pao dengan jumlah penduduk sebanyak 8.012, (laki-laki sebanyak 3.765 jiwa, dan Perempuan sebanyak 4.247 jiwa). **Binamu I** terdiri dari 21 desa, antara lain: Balang, Bulu-Bulu, Bontojai, Jeneponto, Jambe, Empoang, Embo, Kalumpang, Karangrangpajaya, Lembang Loe, Mannyambang, Ujung Loe, Patangtongang, Pattallassang, Parrapa, Paljau, Sapanang, Sapiri, Sidenre, Tarunsape, dan Togo-Togo dengan jumlah penduduk sebanyak 51.414 jiwa, (laki-laki sebanyak 25.075, dan perempuan sebanyak 26.339 jiwa). **Binamu II** terdiri dari 7 desa, antara lain: Tolo, Pangi, Trilana, Rumbri, Kassi, Pettiro, dan Bantorappo dengan jumlah penduduk sebanyak 44.170 jiwa, (laki-laki sebanyak 21.444 jiwa dan perempuan sebanyak 22.726 jiwa). **Binamu III Tamalatega** terdiri dari 8 desa, antara lain: Bonto Tangga, Bonto Ramba, Tonrohassi, Bangkala Loe, Balumbungan, Layu, Lentu, Manjang Loe dengan jumlah penduduk sebanyak 32.524 jiwa, (laki-laki sebanyak 16.320 jiwa dan perempuan sebanyak 16.196 jiwa). **Tarontang** terdiri dari 6 desa, antara lain: Allu, Bontowa, Balang Loe, Ujung, Bontokatangka, dan Tino dengan jumlah penduduk sebanyak 9.354 jiwa, (laki-laki sebanyak 4.679 jiwa dan perempuan sebanyak 4.675 jiwa). **Bangkala** terdiri dari 14 desa, antara lain: Allu, Pallengu, Garassikang, Batubassi, Nasara, Malasoro, Tanatoa, Bulu-bulu, Pyanggoa, Pattiro, Tuju, Karampuang, Barana, Bowwanging dengan jumlah penduduk sebanyak 37.969 jiwa, (laki-laki sebanyak 18.320 jiwa dan perempuan sebanyak 19.649 jiwa).⁹

Perkembangan selanjutnya, yakni pada **tahun 1980** Jeneponto mengalami peningkatan jumlah penduduk sebanyak **241.627 jiwa** (laki-laki sebanyak 117.722 jiwa, dan perempuan sebanyak 123.905 jiwa).¹⁰ Seiring berjalannya waktu, selama kurang lebih delapan belas tahun terakhir, yakni dari tahun 2004 s/d 2021, penduduk Jeneponto telah mengalami perkembangan yang signifikan, meskipun di tahun 2006 sempat mengalami penurunan jumlah dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun berikutnya yakni 2007 kembali meningkat dari jumlah **329.023 jiwa** menjadi **330.735 jiwa**. Hal ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai jumlah **405.508 jiwa** di tahun 2021.¹¹

2. Perubahan Wilayah Sulawesi Selatan: Terbentuknya *Onderafdeeling* Djeneponto

⁹ Masri Singarimbun, *Sensus Penduduk 1961: Penduduk Desa Sulawesi Dan Maluku*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Dan Studi Kependudukan (PPSK) Universitas Gadjah Mada Dan Biro Pusat Statistik., 1980.

¹⁰ Biro Pusat Statistik, "Sulawesi Selatan Dalam Angka, Ujung Pandang: Biro Pusat Statistik.," 1980.

¹¹ BPS 2007, 2010, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto.

Tunduknya kekuasaan raja kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi termasuk Kerajaan Turatea sebagai akibat dari ditandatanganinya Perjanjian Bungaya sebagai takluknya Kerajaan Gowa pada *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC)¹² pada tanggal 18 Nopember 1667. Kekuasaan Hindia Belanda (HB) di Nusantara diatur dalam rangka melindungi sistem kekuasaan yang akan diterapkan sehingga HB membagi daerah menjadi dua bagian utama yakni daerah yang dikontrol langsung (*Rechtsreeksbestuursgebied* atau *Governementslanden*) dan daerah yang tidak langsung dikontrol (*Zelfbestuurslandschappen* atau *Vorstelanden*). Daerah yang dikontrol langsung dibagi lagi menjadi *afdeelingen* dan sub bagiannya *onder afdeelingen*. *Afdeelingen* dipimpin langsung oleh seorang *Kontroleur* Belanda tetapi yang memerintah dipegang oleh seorang Bupati. Bupati adalah seorang penguasa baru yang dibuat oleh Belanda untuk menggantikan konsep *Tumanurung* sebagai penguasa tertinggi tradisional di wilayah Sulawesi Selatan termasuk Turatea dan mereka digelar sebagai raja. Bupati inilah yang menguasai keseluruhan *Regentchaapen*.¹³ Kerajaan Pribumi seperti Kerajaan Turatea tetap diakui sebagai *Inlandsch Bestuur* (Pemerintah lokal atau pemerintah pribumi) dengan gaji berkisar antara 20–75 gulden yang biasa disebut *bezoldiging* atau *Schadeloosteling wegens de afstand der tophanen*. Pemerintahan pribumi disarankan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mencari sendiri sumber-sumber pembiayaannya entah dengan menarik iuran dari penduduk atau melakukan tarikan dalam bentuk barang.¹⁴

Pada tahun 1824 terjadi kesepakatan yang disebut dengan “Traktat London” antara Inggris dengan Belanda untuk kemudian mengatur wilayah Asia Tenggara terutama wilayah Malaysia dan wilayah Indonesia. Isi traktat London bahwa pihak Belanda mengakui kedudukan Inggris atas Singapura dan Semenanjung Malaka sementara Inggris mengakui kedudukan Belanda di wilayah Kepulauan Sebelah Timur Semenanjung

¹² Hindia-Belanda pada abad ke-17 dan 18 tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (*Verenigde Oostindische Compagnie* atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia (Jakarta) sekarang. Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala.

¹³ Heddy Shri Ahimsa Putra, “Hambatan Budaya Dalam Integrasi Politik: Sulawesi Selatan Pada Abad Ke-19,” Buletin Antropologi, No. 16 Tahun VII/1991,” 1991.

¹⁴ Heddy Shri Ahimsa Putra, “Ana’ Karaeng di Bantaeng: Sebuah Studi Tentang Sejarah Politik di Kawasan Pesisiran Sulawesi Selatan,” *Laporan Penelitian P3MP Universitas Hasanuddin yang dibiayai oleh The Toyota Foundation Japan*. 1992.

Malaka (Kepulauan Indonesia), keduanya berjanji untuk membuka wilayah koloninya masing-masing bagi kegiatan perdagangan maritime, sekaligus memberantas bajak laut.¹⁵ Akibat dari perjanjian ini menyebabkan kedudukan Makassar dari Jabatan Gubernur Makassar (*Gouverneur Macassar*) berubah menjadi Gubernur Sulawesi dan Daerah taklukannya (*Gouverneur van Macassar en Onderhoorigheden*) atau dari *Gouvernement van Macassar end Onderhoorigheden* (Provinsi Makassar dan daerah taklukannya) menjadi *Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden* (Provinsi Sulawesi dan daerah taklukannya) pada tahun 1846.

Secara administratif, daerah kepulauan Hindia Timur pengaturannya dimulai pada tahun 1824 bersamaan dengan kunjungan Gubernur Jenderal G.G. van der Capellen ke Ambon dan Makassar. Proses ini dimulai di daerah Sulawesi bagian selatan dengan diwajibkan mereka yang bersedia menjadi sekutu untuk menandatangani Perjanjian Bungaya yang diperbaharui di tahun 1824. Hal ini disebutkan dalam Staatsblad No. 31a 1824 tanggal 17 Juli bahwa (1) Permukiman utama di wilayah ini dijadikan satu distrik, yaitu distrik Makassar yang terdiri dari Benteng Rotterdam, Vlaardingen (*de stad vlaardingen*), dan kampung-kampung sekitarnya (*omliggende kampongs*) serta pulau-pulau di sekitarnya; (2) Wilayah lainnya adalah distrik-distrik selatan (*de zuiden districten*), yakni distrik Maros, Bulukumba dan Bantaeng (*Boelecomba en Bonthain*), dan Pulau Selayar. Distrik-distrik ini kemudian dibagi menjadi beberapa wilayah yang dibawah oleh seorang *regent* (yang wilayahnya disebut *regentschap*), seperti: Aing Toa, Bontolebang, Glissong, Polobanking, Sawakong, Manoeijoe, Balio, Linkes, Takalara, Toppe Djawa, dan Lakatang; (3) Wilayah Maros terdiri atas: *regentschappen* Maros, Bontoa, Tankoeroe, Tanralielie, Siembang, Soelewatang Rilaot (barat), Soelewatang Timboro (selatan), Soelewatang Raja (timur), Soediang, Maniawa, Tjamba, Balotje, Laija, Laboradja, Beengo, Pankadjene of Sioang, Boengoro, Labakkang, Marang, Kaloekoea, Segerie, Katene dan Mandelle; (4) Wilayah Bulukumba dan Bantaeng terdiri dari *regentschappen* Bantaeng dan Tompo-Boeloe, Gantarang, Tala, Palewoot of Palewooi, Tanna-Bero, Bonto Tanga dan Ara, Lemo-Lemo, Oedjong Lowe, Weiro, Langa-Langa, Tiero of Tero dan Biera; dan (5) Wilayah Seleijer, terdiri atas: *regentschappen* Bonto Bangon, Tanette, Batang Matta, Boekiet, Mare Mare, Bonea, Opa Opa, Gantarang, Balla Boeloe, Laijolo, Bonto Boros, Barang Barang, Poeta Bangon, dan Onto.¹⁶

¹⁵ P. H. van der Kemp, "De Geschiedenis van Het London Tractat van 17 Maart 1824", dalam BKI No. 56. 1904., 1904.

¹⁶ "Staatsblad No. 31a" (1824).

Daerah Turatea, seperti Bangkala, Binamu dan Laikang yang awalnya sebagai sekutu, kemudian diserap menjadi daerah pemerintahan. Penyerapan daerah Bangkala dan Binamu dilakukan melalui Surat Keputusan Gubernur Jendral tahun 1866, keduanya menjadi satu *onderafdeeling* dalam *Zuiderdistricten*.¹⁷ Sedangkan daerah Laikang baru diserap menjadi daerah pemerintahan melalui Keputusan tanggal 17 Maret 1908.¹⁸ Sama halnya kota Makassar dilakukan pengaturan pada tahun 1906, ketika Makassar ditetapkan sebagai *gemente* atau bagian dari perubahan yang dituntut masyarakat kota adanya otonomi sesuai *Desentralisatiewet* 1903.

Secara administratif, seluruh wilayah Sulawesi Selatan mulai diatur pada tahun 1909. Pengaturan ini dilakukan melalui Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang reorganisasi pemerintahan di Sulawesi Selatan.¹⁹ Melalui keputusan ini, Sulawesi Selatan dibagi menjadi dua *afdeelingen*, yakni *afdeeling* Makassar dan Bonthain. Kedua *afdeeling* ini masing-masing dibagi menjadi lima *onderafdeeling*. *Afdeeling* Makassar terdiri dari *onderafdeeling* Makassar, Pangkadjene, Maros, West-Goa dan Takalar. Sedangkan *afdeeling* Bonthain terdiri dari *onderafdeeling* Bonthain, Djenepono, Boeloekoemba, Sindjai, dan Saleier. Masing-masing *Afdeeling* diperintah oleh Asistent Resident, sedangkan untuk wilayah *Onderafdeeling* diperintah seorang kontrolir (*Controleur*). Jabatan-jabatan itu juga diemban oleh pejabat-pejabat dari pemerintah Belanda.

Dua tahun kemudian, perubahan itu kembali dilakukan melalui surat keputusan Gubernur Jenderal tentang *Reorganisatie van het Bestuur en de Bestuursmiddelen in genoemd Gouvernement*, seluruh wilayah Sulawesi Selatan yang tadinya hanya dua *afdeelingeng* menjadi tujuh, yakni: Makassar, Bonthain, Boni, Pare-Pare, Mandar, Loewoe, dan Oost-Celebes. *Afdeeling* Makassar (Makassar) dibagi menjadi lima *onderafdeeling*, yakni: (1) *Onderafdeeling* Makassar yang membawahi distrik Makassar, Wadjo, Endeh, Malajoe, Oedjoengtanah dan Mariso serta pulau-pulau di sekitarnya. (2) *Onderafdeeling* Pangkadjene. (3) *Onderafdeeling* Maros yang terdiri dari distrik Tjamba, Malawa, Tjenrana, Laija, Gantarang Matinggi, Maros, Tanralili, Toerikale-landen, Ri Laoe, Bontoa, Bira, Biringkanaja, Montjongloe dan Soediang di bawah seorang *Controleur* yang berkedudukan di Maros. (4) *Onderafdeeling* West-Goa, terdiri dari distrik Goa dengan delapan *onderdistrict*, yakni Karuwisi, Mangasa, Tombolo, Borongloe, Patalasang, Borisallo, Manoedjoe dan Parigi, semuanya diperintah oleh seorang *Civil Gezaghebber* yang bertempat di Soenggoeminasa. (5) *Onderafdeeling*

¹⁷ "Staatsblad No. 69" (1866).

¹⁸ "Staatsblad No. 253" (1908).

¹⁹ "Staatsblad No. 359" (1909).

Takalar terdiri dari distrik Takalara, Topedjawa, Polombangken, Lamabone, Galeson, Papa, Lengkesse, Lakatong, Bontonopmo, Montjobalang, dan Limbung. Sedangkan *Afdeeling* Bonthain (Bantaeng) dibagi menjadi lima *Onderafdeeling*, yakni *Onderafdeeling* Bonthain, Djeneponto, Boeloekoemba, Sindjai, dan Saleier. *Onderafdeeling* Bonthain dibagi menjadi tiga distrik yaitu Bonthain, Taroang dan Malakadji. *Onderafdeeling* Djeneponto dibagi empat distrik, diantaranya Laikang, Bangkala, Binamoe dan Aroengkeke di bawah seorang *Civiel Gezaghebber*. Sedangkan *Onderafdeeling* Boeloekoemba terdiri atas distrik Boeloekoemba Toa, Gantarang, Oedjoengloe, Kindang, Bira dan Kadjang di bawah seorang *Controleur*. (4) *Onderafdeeling* Sindjai dibagi atas distrik Oost-Boelo-Boelo, Lamati, Tondong, West Boelo-Boelo, Manipi dan Toeroengan, Manimpahpi dan Pao.²⁰

Bagian pemerintahan Makassar yang terdiri dari lima cabang pemerintahan itu, berdasarkan penataan wilayah pemerintahan daerah adat tahun 1916, terdiri dari empat puluh enam daerah adat. Dalam Staatsblad No. 352 dinyatakan bahwa cabang pemerintahan Makassar terdiri dari distrik Makassar, Wajo, Ujungtanah dan Mariso; cabang pemerintahan Pangkajene terdiri dari distrik Pangkajene, Labakkang, Sigeri, Marang, dan Baloci; cabang pemerintahan Maros terdiri dari distrik Camba, Malewa, Cenrana, Laiya, Gantarang-Matinggi, Maros, Tanralili, Daerah Turikale, Rilau, Bontoa, Bira, Biringkanaya, Moncongloe dan Sudiyang; cabang pemerintahan Gowa terdiri dari distrik: Limbung dan Monco Balang, Mangasa, Tombolo, Borongloe, Pattallassang, Barisallo, Mamuju, dan Parigi; cabang pemerintahan Jeneponto-Takalar terdiri dari distrik Bontonopmo, Takalar, Topejawa, Polombangkeng, Sanrobone, Galesong, Pappa, Lengkesse, Lakatong, Laikang, Bangkala, Binamu, Arungkeke, dan Malakaji.²¹

Pada masa selanjutnya jumlah itu mengalami perubahan. Daerah adat Pangkajene misalnya, dibagi menjadi dua daerah adat yaitu Daerah Adat Pangkajene dan Daerah Adat Bungoro pada tahun 1918, mengingat penetapan tahun 1916 mencakup dua Wilayah *bori*, Pangkajene dan Bungoro. Sama halnya dengan daerah Adat Sigeri yang merupakan kesatuan wilayah *bori* Sigeri dan Mandalle, pada tahun 1918 dipisahkan dan masing-masing ditetapkan sebagai daerah adat. *Bori* Toroang sebelumnya merupakan wilayah daerah adat Binamu kemudian dipisahkan dan dijadikan daerah adat Tarowang, terlepas dari daerah adat Binamu. Perubahan-perubahan ini nampak dalam Staatsblad No. 352 dan 573 tahun

²⁰ "Staatsblad No. 605" (1911).

²¹ Staatsblad No. 352 (1916).

1910, dan Staatsblad No. 476 tahun 1924.²² Perubahan-perubahan tersebut pada dasarnya pemerintah menerima kedudukan *bori* dan menetapkan sebagai wilayah daerah adat.²³

3. Dari *Onderafdeeling* Jeneponto ke Kabupaten: Proses Pembentukan Daerah Otonom

Jeneponto merupakan salah satu wilayah pemerintahan di Sulawesi Selatan yang memiliki proses sejarah daerahnya. Hal tersebut ditandai dengan dilakukannya penataan wilayah pemerintahan di Sulawesi Selatan termasuk *Onderafdeeling* Jeneponto didalamnya. *Onderafdeeling* Jeneponto tampil sebagai salah satu wilayah pemerintahan. Pada tahun 1917, wilayah pemerintahan Makassar dan Bonthain dibagi menjadi tiga bagian pemerintahan, yakni Makassar, Sungguminasa, dan Bantaeng. Bagian pemerintahan Makassar berdasarkan perubahan itu terdiri dari tiga cabang pemerintahan yaitu Makassar, Maros dan Pangkajene. Dua cabang pemerintahan lainnya dijadikan wilayah bagian pemerintahan Sungguminasa. Sementara cabang pemerintahan Jeneponto, sebelum perubahan itu merupakan salah satu cabang pemerintahan dari bagian pemerintahan Sungguminasa.²⁴ Jika pertimbangan Swaab ini, dijadikan alasan perubahan penataan kembali pemerintahan, seharusnya perubahan yang dilakukan pada tahun 1917 tidak didasarkan atas pertimbangan luasnya wilayah dan keinginan agar dapat melakukan pemerintahan secara saksama. Hal itu muncul karena perubahan pada masa Swaab kembali menempatkan luas wilayah bagian pemerintahan Makassar sesuai dengan pengaturan tahun 1911 ditambah cabang pemerintahan Jeneponto, dengan kata lain bagian pemerintahan Makassar dan Sungguminasa dijadikan satu pemerintahan yaitu Makassar.

Pada tahun 1931 adat *Gemeenschap* Malakaji bergabung dengan Gowa yang sebelumnya berada di bawah *Onderafdeeling* Jeneponto. Tahun 1937, bekas kekuasaan Gowa dijadikan satu wilayah bumiputera yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai kerajaan. Kedudukan Kerajaan Gowa berdasarkan penataan wilayah pemerintahan, sejajar dan setaraf dengan wilayah cabang pemerintahan. Pemerintahan Gowa secara langsung berada dibawah pengawasan asisten residen Makassar. Sedangkan wilayah cabang pemerintahan lainnya tidak berubah (tetap), kecuali cabang pemerintahan Jeneponto dan Takalar yang digabungkan dan dinamakan cabang pemerintahan. Pemerintahan Makassar ini yang berlangsung hingga tahun 1942, ketika tentara Pendudukan Jepang mengambil alih kekuasaan atas wilayah Sulawesi Selatan.

²² Staatsblad No. 352, 573 (1910); dan Staatsblad No. 476 (1924).

²³ Sagimun M. D., *Pahlawan Nasional: Sultan Hasanuddin Ayam Jantan Dari Ufuk Timur*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

²⁴ Staatsblad No. 476 (1924).

Pada tahun 1938, Hindia Belanda kembali melakukan penataan ulang pemerintahan. Daerah-daerah kekuasaan diluar Jawa dibagi dalam tiga pemerintahan (*gouvernement*) yaitu Sumatera, Kalimantan (*Borneo*) dan Timur Besar (*Groote Oost*). Pemerintahan Timur Besar terdiri dari lima keresidenan (*residentie*) yaitu Sulawesi dan daerah bawahan, Menado, Maluku, Timor dan daerah bawahan, dan Bali dan Lombok.²⁵ Perubahan ini pada dasarnya tidak merubah penataan pemerintahan di bagian pemerintahan Makassar, kecuali perubahan penyebutan *Geuverbnement Celebes en Onderboorigheden* menjadi *Residentie Celebes en Onderborigheden*.²⁶

Perubahan selanjutnya dilakukan pada tahun 1941, Keresidenan *Celebes* (Sulawesi) membagi kedalam tujuh *afdeeling* (kabupaten), yaitu: *afdeeling* Makassar, Bonthain, Bone, Pare-pare, Mandar, Luwu, dan Buton. Ketujuh *afdeeling* ini masing-masing membawahi beberapa *onderafdeeling*, antara lain: *Afdeeling* Makassar terdiri dari: *onderafdeeling* Makassar, Maros, Pangkajene, Goa, Jenepono-Takalar. *Onderafdeeling* Jenepono-Takalar (JENTAK) terdiri dari beberapa distrik, antara lain: Distrik Takalara, Topejawa, Polongbangkeng, Sanrabone, Galesong, Pappa, Lengkesse, Lakatong, Laikang, dan Bangkala, pulau-pulau Tanakeke, Auluang, Satanga dan Dayang-Dayangan, Binamu (termasuk masyarakat adat Tarowang, Rumbia, dan Tino-Pacinongan), dan Arungkeke.²⁷ *Onderafdeeling* Jenepono-Takalar kembali dipisahkan pada tahun 1943.

Ketika Pendudukan Jepang mulai melebar di Indonesia pada 1942-1945, sistem pemerintahan secara keseluruhan ikut berubah, seperti *Residen* diganti *Syu*, *Stadgemente* (Kotapraja) diganti *Si*, *Afdeeling* menjadi *Ken*, *Onderafdeeling* disebut *Buken*, *Distrik* menjadi *Gun*, *Onderdistrik* menjadi *Son*. Begitu pula dengan kepala-kepala yang memerintah, yakni Keresidenan dibawah oleh seorang *Minseibu-tyookan*, *Ken* oleh seorang *Ken Kanriken*, *Bunken* oleh seorang *Buken Kanriken*, *Syuu* oleh seorang *Syuu-tyo*, *Gun* oleh seorang *Gunttyoo*, *Son* oleh seorang *Sontyoo*. Kedua sistim pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa secara administratif posisi Jenepono masa Hindia Belanda setaraf *Onderafdeeling* dan masa Pendudukan Jepang, Jenepono berubah menjadi *Buken* yang diperintah seorang *Buken Kanriken*.²⁸

²⁵ Staatblad No. 352 (1938).

²⁶ Edward L. Poelinggomang, *Perubahan Politik Dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*, Yogyakarta: Ombak., 2004.

²⁷ B. S. Harvey, *Pemberontakan Qabar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII*. Jakarta: Grafiti., 1989.

²⁸ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, "Pemerintahan Daerah Kotamadya Parepare Vol. I Tahun 1889-1981, Makassar: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan,," 2017.

Awal tahun 1946 *Adatgemeenschap* Laikang yang sebelumnya bagian dari wilayah kekaraengan Jeneponto bergabung dengan *Onderafdeeling* Takalar. Pada Januari 1948, Hadat Turatea terbentuk dan diketuai oleh seorang *Bestuurschoofd* bernama Sampara Daeng Lili. *Onderafdeeling* Jeneponto kemudian dibagi menjadi empat *Distriten* (distrik), yakni Distrik Binamu, Bangkala, Arungkeke dan Tarowang.²⁹ Wilayah ini merupakan bagian dari Residen Koordinator Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan pembentukannya sebelumnya yang meliputi bekas Keresidenan Sulawesi Selatan dan Daerah Taklukannya (*Residentie van Zuid-Celebes en Onderhoorigheden*). Surat keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 17 Februari 1950 No. Peta. 20/2/9. Hal ini berdasarkan penetapan Pemerintahan Timur Besar (*Gouvernement van Grote Oost*) pada tanggal 24 Februari 1940 No. 21, *bijblad* 14377, Sulawesi Selatan terbagian atas tujuh *Afdeeling*, yaitu: *Afdeeling* Makassar, *Afdeeling* Bonthain, *Afdeeling* Bone, *Afdeeling* Pare-Pare, *Afdeeling* Mandar, *Afdeeling* Luwu, *Afdeeling* Buton dan Laiwui. Khusus untuk wilayah *Afdeeling* Makassar yang membawahi *Onderafdeeling* Sungguminasa, Takalar, Jeneponto, Maros, Pangkajene.³⁰

Pada tahun 1952 dilakukan penataan pemerintahan, sehingga Daerah Sulawesi Selatan diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Penataan ini dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan (*Swapraja*) dan pembentukan Daerah *Swantantara* (otonom) tanggal 12 Agustus 1952. Wilayah Jeneponto dimasukkan dalam wilayah *Afdeeling* Makassar yang berkedudukan di Sungguminasa.³¹ Salah satu bentuk penataan itu adalah pembentukan DPRD di masing-masing tujuh daerah (*afdeeling*) di atas diwakili oleh anggota yang besarnya berbeda-beda, tergantung dari jumlah penduduk, potensi ekonomi dan luas wilayah. Kewenangan diberikan agar daerah tersebut dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Misalnya, Makassar yang ibukotanya

²⁹ ANRI Makassar, "Laporan Politik Tahun 1953 Dan 1959 Dari Daerah Jeneponto/Takalar. Inventaris Arsip Statis Provinsi Sulawesi (Rahasia) Tahun 1946-1960, No. Register 242," n.d.

³⁰ Khusus untuk wilayah *Afdeeling* Makassar, dalam *Beslit* Menteri Urusan Dalam Negeri Negara Indonesia Timur di Makassar tanggal 20 Maret 1950, menetapkan *Afdelling* Makasaar pada bagian A.1, 1-5 dari *beslit* Gubernur Timur Besar diubah dengan *beslit* tertanggal Januari 1950 No. UPU1/1/45. Makassar dibagi lagi menjadi dua *Afdeling* tersendiri, yakni *Afdeling* Kota Makassar dan *Afdeling* Makassar (Lihat: UU Darurat RI No. 2 tahun 1957, "Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar Dan Daerah Jeneponto-Takalar").

³¹ Hal ini tertuang dalam pasal 1 yang berbunyi: "Daerah Makassar yang meliputi daerah administratif *Afdeeling* Makassar menurut penetapan Gubernur Timur Besar dulu tanggal 24 Februari 1940 No. 21 (*bijblad* No. 14377) dan terakhir diubah dengan surat keputusan Gubernur Sulawesi tanggal 20 Oktober 1951 Nr. 618 terkecuali daerah Kota Makassar dan Pulau-pulau, seperti Lae-lae, Samalona dan Moreaux. Selanjutnya pada pasal 2 disebutkan bahwa "Tempat kedudukan pemerintahan Daerah-daerah tersebut pada pasal 1 adalah masing-masing sebagai: 1. Daerah Makassar di Sungguminasa" (Lihat: PP. No. 34, "Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya Dalam Daerah-Daerah Swantara" (1952).

Sungguminasa mencakup wilayah Gowa, Takalar, Jeneponto, Maros, Pangkajene dan Pulau-pulau Makassar, memiliki 35 orang anggota DPRD. Sedangkan Bantaeng dengan ibukota Bantaeng yang mencakup Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Selayar mempunyai 21 orang, Bone 35 orang, Pare-pare 26 orang, Mandar 20 orang, dan Luwu 25 orang DPRD Sementara.³²

Enam tahun kemudin, yakni pada tahun 1957 terjadi lagi perubahan di tiga daerah yaitu Makassar, Bone dan Luwu. Ketiga daerah tersebut, antara lain: Pertama, Makassar yang dibagi menjadi tiga daerah, yaitu: (1) Makassar dengan ibukota Pangkajene, mencakup Maros dan pulau-pulau Spermonde dengan jumlah penduduk kurang lebih 325.000 jiwa. (2) Gowa, dengan ibukota Sungguminasa mempunyai penduduk kurang lebih 223.925 jiwa dengan 20 orang anggota DPRD meliputi bekas *onderafdeeling* Sungguminasa dalam Swapraja Gowa, (3) Jeneponto-Takalar dengan ibukota Jeneponto memiliki jumlah penduduk kurang lebih 250.000 jiwa dengan 20 orang anggota DPRD, meliputi bekas *onderafdeeling* Jeneponto dan Takalar.³³

Kedua, Bone dibagi menjadi 3 daerah, yaitu; (1) Daerah Bone dengan ibu kota Watampone mempunyai 25 orang anggota DPRD, meliputi seluruh bekas *onderafdeeling* Bone, (2) Wajo dengan ibukota Sengkang mempunyai 20 orang anggota DPRD, meliputi seluruh bekas *onderafdeeling* Wajo, (3) Soppeng dengan ibukota Watansoppen mempunyai 20 orang anggota DPRD, meliputi seluruh bekas *onderafdeeling* Soppeng/Swapradja Soppeng.

Ketiga, Daerah Luwu dimekarkan menjadi dua daerah, yaitu; (a) Daerah Luwu dengan ibukota Palopo mempunyai 20 orang anggota DPRD meliputi seluruh bekas *onderafdeeling* Palopo, Masamba, dan Malili, (b) Tanatoraja, dengan ibukota Makale mempunyai 20 orang anggota DPRD, meliputi seluruh bekas *onerafdeeling* Makale/Tanatoraja. Namun, ini berlaku hanya dua tahun disebabkan oleh konflik politik, sehingga dua tahun berikutnya, tepat tanggal 1 Mei 1959 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan terbentuknya daerah tingkat II di Sulawesi, dan pemisahan Takalar dari

³² UU Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah-Daerah Swantara, (1952).

³³ UU Darurat RI No. 2 tahun 1957, Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto-Takalar.

Jeneponto.³⁴ Khusus Daerah Jeneponto, memiliki jumlah penduduk sebanyak 147.867 jiwa dan 15 orang anggota DPRD.³⁵

Sejak terbentuknya sebagai Kabupaten, Jeneponto dipimpin oleh 13 orang Bupati, yakni: Maladjong Dg. Liwang sebagai Bupati pertama (1959-1960), kedua Abd. Jalil Sikki menggantikan Maladjong Dg. Liwang (1960-1966), ketiga Drs. M. Daud Nompo (1967) sebagai Plt, keempat Morra Karaeng Bilu' (1967-1972) sebagai Plt, kelima A. M. Amin Situru (1973-1974), keenam M. Ishak Iskandar (1974-1980); ketujuh Drs. Palangkey Dg. Lagu (1980-1985), kedelapan Drs. Schuddin (1985-1990); kesembilan Drs. H. M. Ilyas Mattewakkang (1990-1993); kesepuluh H. Sirajuddin S. (1993-1998); kesebelas bernama Dr. Ir. H. Baharuddin Baso Tika, MS (1998-2003); keduabelas Drs. H. Radjamilo, MP berkusa selama dua periode sejak (2003-2008) dan (2008-2013); dan ketigabelas Drs. H. Ikhsan Iskandar, M. Si (2013-2018). Setelah masa jabatannya berakhir, Drs. H. Iksan Iskandar, M. Si kembali tampil dan memenangkan Pilkada 2018. Sehingga, Drs. H. Iksan Iskandar, M. Si menjabat kembali sebagai Bupati untuk yang kedua kalinya pada periode (2018-2023).

Awalnya Bupati mengendalikan lima kecamatan yang diwadahnya. Kecamatan tersebut masing-masing Kecamatan Bangkala, Tamalatea, Binamu, Batang, dan Kelara. Selanjutnya menjadi enam kecamatan, yaitu Kecamatan Arungkeke, Binamu I, Binamu II, Binamu III Tamalatega (baca: Tamalatea), Tarontang (baca: Tarowang), dan Bangkala. Perkembangan Kabupaten Jeneponto sampai sekarang ini mengalami kemajuan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pemekaran wilayah di Kabupaten Jeneponto menjadi 11 kecamatan, antara lain: Kecamatan Bangkala, Bangkala Barat, Tamalatea, Bontoramba, Binamu, Turatea, Batang, Arungkeke, Tarowang, Kelara, dan Rumbia.³⁶

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bawa sebelum muncul Jeneponto, ada nama lain yang disebut "Turatea". Turatea merupakan salah satu

³⁴ UU RI No. 29 tahun 1959, "Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi" (1959).

³⁵ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, *Transliterasi Memori Timbang Terima Residen Koordinator Sulawesi Selatan Alimoeddin Daeng Mattiro, 5 November 1956-30 Juni 1960, Makassar: Badan Arsip Dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.*, 2005.

³⁶ Masri Singarimbun, *Sensus Penduduk 1961: Penduduk Desa Sulawesi Dan Maluku*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Dan Studi Kependudukan (PPSK) Universitas Gadjah Mada Dan Biro Pusat Statistik., 1980; Central Statistics Agency (BPS) of South Sulawesi, *Sulawesi Selatan Dalam Angka [South Sulawesi in Figures] 1981*, 1981; BPS, *Sulawesi Selatan Dalam Angka, Ujung Pandang: Biro Pusat Statistik.*, 1980; Central Statistics Agency (BPS) of South Sulawesi, *Sulawesi Selatan Dalam Angka [South Sulawesi in Figure] 1983*, 1983; Central Statistics Agency (BPS) of South Sulawesi, *Sulawesi Selatan Dalam Angka [South Sulawesi in Figure] 1984*, 1984.

Kerajaan Makassar (Jeneponto sekarang), di Sulawesi Selatan. Dalam penataan wilayah, Jeneponto mengalami perubahan yang nampak sejak masa Hindia Belanda hingga masa Pendudukan Jepang. Ada empat perubahan yang nampak di Jeneponto, antara lain: Pertama, di masa Kerajaan, Jeneponto yang disebut Turatea adalah wilayah yang merdeka, memiliki sistem pemerintahan yang disebut ke-*karaeng*-an, dan mengatur negerinya sendiri. Kedua, pada tahun 1909, pemerintah Hindia Belanda melakukan penataan wilayah di Sulawesi Selatan. Salah satu bentuk penataan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda yaitu pembentukan *Onderafdeeling* Jeneponto di bawah perintah seorang *Civiel Gezaghebber*. Ketiga, di masa Pendudukan Jepang, sistem pemerintahan di wilayah Jeneponto berubah menjadi *Buken* yang diperintah oleh seorang *Buken Kanriken*. Hal ini berlangsung hingga Belanda kembali menguasai Indonesia, dan menempatkan seorang *Bestuurschoofd* sebagai pemerintah di *Onderafdeeling* Jeneponto yang terdiri dari empat *Distriten* (distrik), yakni Distrik Binamu, Bangkala, Arungkeke dan Tarowang. Keempat, pada tahun 1957, Jeneponto digabungkan dengan Takalar yang berkedudukan di Jeneponto. Dua tahun kemudian, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, sehingga kedua daerah memiliki kedudukan masing-masing (berdiri sendiri). Dengan demikian, Daerah Tingkat II Jeneponto berkedudukan di Jeneponto dan daerah Tingkat II Takalar berkedudukan di Takalar.

Referensi

- Aubert, Jean Michiel. "Kart van Een Deel van de Zuidkust van Celebes," 1752.
- B. S. Harvey. *Pemberontakan Qahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII*. Jakarta: Grafiti., 1989.
- BPS. "Kabupaten Jeneponto Dalam Angka," 2022.
- . *Sulawesi Selatan Dalam Angka, Ujung Pandang: Biro Pusat Statistik.*, 1980.
- BPS 2007, 2010, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, 2007. "No Title," n.d.
- F. G. Steck. "Kaart van Celebes En Onderhorigheden," 1858.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia., 1986.
- Hadrawi, Muhlis. "'Bangkala Dan Binamu: Suatu Kajian Naskah Lontara' Dalam Sosial-Politik Jeneponto Kuno'." *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia, Volume 2 Edisi 2, Desember 2017.*, 2017.

- Ian Caldwell & Wayne A Bougas. *Sejarah Awal Binamu Dan Bangkala Di Sulawesi Selatan, Yogyakarta: Ombak.*, 2016.
- Makassar, ANRI. "Laporan Politik Tahun 1953 Dan 1959 Dari Daerah Jeneponto/Takalar. Inventaris Arsip Statis Provinsi Sulawesi (Rahasia) Tahun 1946-1960, No. Register 242," n.d.
- Map. "Sout Zee van Celebes," 1693.
- P. H. van der Kemp. "*De Geschiedenis van Het London Tractat van 17 Maart 1824*", Dalam *BKI No. 56. 1904.*, 1904.
- Poelinggong, Edward L. *Perubahan Politik Dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942, Yogyakarta: Ombak.*, 2004.
- PP. No. 34. Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya Dalam Daerah-daerah Swantara (1952).
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. "'Hambatan Budaya Dalam Integrasi Politik: Sulawesi Selatan Pada Abad Ke-19,'" Buletin Antropologi, No. 16 Tahun VII/1991," 1991.
- . "Ana' Karaeng Di Bantaeng: Sebuah Studi Tentang Sejarah Politik Di Kawasan Pesisiran Sulawesi Selatan, Laporan Penelitian P3MP Universitas Hasanuddin Yang Dibiayai Oleh The Toyota Foundation Japan.," 1992.
- Sagimun M. D. *Pahlawan Nasional: Sultan Hasanuddin Ayam Jantan Dari Ufuk Timur, Jakarta: Balai Pustaka.*, 1992.
- Selatan, Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi. *Transliterasi Memori Timbang Terima Residen Koordinator Sulawesi Selatan Alimoeddin Daeng Mattiro, 5 November 1956-30 Juni 1960, Makassar: Badan Arsip Dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.*, 2005.
- Selatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi. "Pemerintahan Daerah Kotamadya Parepare Vol. I Tahun 1889-1981, Makassar: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan.," 2017.
- Singarimbun, Masri. *Sensus Penduduk 1961: Penduduk Desa Sulawesi Dan Maluku, Yogyakarta: Pusat Penelitian Dan Studi Kependudukan (PPSK) Universitas Gadjah Mada Dan Biro Pusat Statistik.*, 1980.
- Staatblad No. 352 (1938).
- Staatblad No. 476 (1924).
- Staatsblad No. 253 (1908).
- Staatsblad No. 31a (1824).
- Staatsblad No. 352 (1916).
- Staatsblad No. 359 (1909).

Staatsblad No. 476 (1924).

Staatsblad No. 605 (1911).

Staatsblad No. 69 (1866).

Statistik, Biro Pusat. "Sulawesi Selatan Dalam Angka, Ujung Pandang: Biro Pusat Statistik,," 1980.

Sulawesi, Central Statistics Agency (BPS) of South. *Sulawesi Selatan Dalam Angka [South Sulawesi in Figure] 1983*, 1983.

———. *Sulawesi Selatan Dalam Angka [South Sulawesi in Figure] 1984*, 1984.

———. *Sulawesi Selatan Dalam Angka [South Sulawesi in Figures] 1981*, 1981.

UU Darurat RI No. 2 tahun 1957. Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto-Takalar (1957).

UU RI No. 29 tahun 1959. Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (1959).

Volkstelling 1930. Inbeemsche Bevolking Van Borneo, Celebes, De Kleine Soenda Eilanden En De Molukken, Deel V, Departement Van Economische Zaken. Batavia: Landsdrukkerij, 1936., n.d.